

Judul : Layanan nggak sesuai, jemaah haji layak dapat kompensasi
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Layanan Nggak Sesuai

Jemaah Haji Layak Dapat Kompensasi

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Catatan tersebut disampaikan dalam rapat bersama DPD Komisi VIII DPR, Sabtu (23/8/2025).

Wakil Ketua I DPD Dailami Firdaus membeberkan, pihaknya mendukung peningkatan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Karena, hal ini akan memperkuat kewenangan dalam pengelolaan haji di Indonesia. "Perkuat status BP Haji agar setara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi," ujarnya.

Selain kelembagaan, Dailami juga menilai pentingnya penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dilakukan lebih awal. Dengan begitu, persiapan bisa lebih matang dan tidak menimbulkan kerugian bagi jemaah bila terjadi perubahan biaya. "Maksimal 14 hari kerja agar tidak merugikan jemaah," tegasnya.

Masalah kuota haji pun ikut menjadi sorotan. Dailami menilai distribusi kuota harus lebih transparan dan berkeadilan antar daerah. Untuk itu, dia mengusulkan adanya sistem dashboard

real time yang bisa menampilkan daftar tunggu jemaah secara terbuka.

Dia menambahkan, pengawasan dan sanksi terkait penyalahgunaan kuota perlu diperkuat. Perlindungan bagi whistleblower, publikasi sanksi, hingga penguatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) harus masuk dalam regulasi.

"Tapi yang lebih penting adalah bagaimana penegakan. Kami mendorong perlindungan whistleblower, publikasi sanksi, serta penguatan PPNS dengan kapasitas forensik digital untuk menindak mafia haji," tegasnya.

Catatan lain yang disampaikan adalah perbaikan tata kelola Arafah, Muzdalifah, Mina (Armima). Dailami mendorong ketersediaan akomodasi, transportasi yang disiplin, hingga mitigasi bencana yang lebih terukur, serta peningkatan koordinasi dengan pihak syaria'ah.

Aspek kesehatan jemaah tak luput dari perhatian. Menurut Dailami, layanan kesehatan dalam penyelenggaraan haji harus ditingkatkan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi. Hal itu menyangkut penguatan pemeriksaan ulang



Dailami Firdaus

sebelum keberangkatan.

"Harus ada peningkatan program haji ramah lansia, penilaian aspek fisik, mental, dan medis, serta perhatian khusus bagi jemaah berisiko tinggi," ucap senator asal Jakarta itu.

Dia juga menegaskan perlunya kepastian kompensasi bagi jemaah, otomatis apabila ada keterlambatan atau kegagalan layanan, tanpa harus menunggu klaim manual dari jemaah. "Evaluasi kontrak multi tahun juga wajib diumumkan secara terbuka dengan score card vendor," katanya.

Ketua Komisi VIII Marwan

Dasopang menjelaskan, rapat kali ini memiliki agenda khusus mendengarkan pandangan dan masukan dari DPD sebagai bagian dari mekanisme legislasi. Pertimbangan ini penting sebagai landasan pembahasan pada tingkat berikutnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, sesuai Pasal 21 UUD 1945 serta Tata Tertib DPR, setiap pembahasan RUU inisiatif DPR perlu melalui tahapan pengantar musyawarah. Salah satunya dengan mendengarkan pertimbangan DPD.

"Kami membutuhkan masu-

kan dari DPD agar regulasi yang dibentuk benar-benar komprehensif dan menjawab tantangan penyelenggaraan haji ke depan," ujar Marwan.

Selain itu, dia menyebut, pembahasan RUU ini memiliki urgensi tinggi, mengingat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Saudi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2019. Masukan DPD tetap menjadi bagian penting untuk memperkaya substansi RUU.

Komisi VIII, lanjutnya, berkomitmen menuntaskan pembahasan bersama Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) secara intensif. "Setelah mendengarkan pertimbangan DPD, Panja akan melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama Pemerintah, bahkan dengan pola rapat maraton siang dan malam," jelasnya.

Dia berharap sinergi DPR dengan DPD bisa memperkuat kualitas legislasi dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. "Kami berterima kasih atas kehadiran DPD, karena ini adalah bagian penting dari proses legislasi yang demokratis dan inklusif," pungkasnya. ■ PYB